



PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan



Rancangan RPJPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2045

Disampaikan Oleh:
Kepala Bappelitbangda
Drs. DOHRI AS'ARI
Pada Acara Musrenbang RPJPD



BAPPELITBANGDA

OUTLINE

Permasalahan Pembangunan

Isu Strategis

Visi dan Misi

Sasaran Pokok

Arah Kebijakan



PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

01

Masih rendahnya kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim

Ditandai dengan masih tingginya Indeks risiko bencana, rendahnya indeks pembentuk IKLH, intensitas emisi GRK yang tinggi serta intensitas energi yang belum tercapai, kecenderungan terjadi alih fungsi penutupan lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Luwu Timur terjadi pada Kawasan lindung; Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 sebesar 0,44%.

02

Tingginya pertumbuhan penduduk dan ratio ketergantungan usia tidak Produktif

pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan di tahun 2022 yang mencapai 308.530 jiwa sebesar 1,16%, tekanan terhadap ketersediaan lahan untuk permukiman, pertanian dan aktivitas penduduk lainnya. Penambahan jumlah penduduk Penambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat memberikan dampak terhadap lingkungan, perubahan sosial, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Sehingga perlu disikapi secara cermat dan terukur.

03

Laju Pertumbuhan Perekonomian Daerah cenderung melambat

Perekonomian Luwu Timur sangat Fluktuatif, Ketergantungan peranan lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian yang masih mendominasi struktur kontribusi terhadap perekonomian daerah, sehingga Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan meningkatkan risiko ketika sektor pertambangan mengalami guncangan dapat mempengaruhi sektor lainnya.

04

Melambatnya Penurunan Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2022 mencapai 6,81% atau 20.890 ribu orang, termasuk terendah Sulawesi Selatan, Dan data rilis terakhir tahun 2023 angka kemiskinan kembali naik mencapai 6,93% atau 21,570 ribu orang, karena perubahan standar garis kemiskinan. Perlu menjadi perhatian serius dalam jangka panjang mencermati data proyeksi penduduk Indonesia sampai tahun 2045.

Lanjutan.....

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

05

Belum meratanya pendapatan masyarakat

kondisi rasio gini pada tahun 2022 masih tinggi sebesar 0,394. meskipun PDRB/kapita pada tahun 2022 sebesar 92.98 Juta/kapita lebih tinggi dari provinsi Sulawesi-Selatan dan nasional, tingkat pendapatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pendapatan yang merata di masyarakat, belum optimalnya tingkat produktivitas pada kegiatan ekonomi dimasing-masing wilayah berbeda.

06

Belum berkembangnya Ketahanan Sosial Budaya

Belum berkembangnya ketahanan sosial budaya ditandai dengan beberapa indikator antara lain Indeks Pembangunan Keluarga. Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 mencapai angka 53,6 poin artinya posisi indeks pembangunan keluarga di Kabupaten Luwu Timur masih dibawa dari skor Indeks Pembangunan Keluarga di Indonesia sebesar 56,07 poin. Dan angka tersebut masih jauh dari target indeks pembangunan keluarga yang berkualitas yaitu dengan nilai 70 keatas.

07

Tingginya Ketimpangan Gender

ditandai dengan nilai Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,447 pada tahun 2022. Lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebesar 0,390. Tiga indikator yang dipakai dalam IDG, antara lain keterlibatan perempuan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan

08

Masih Rendahnya Daya Saing Daerah

Meskipun Data IDSD Luwu timur tahun 2022 berada pada kategori tinggi namun untuk level provinsi Sulsel Masih berada pada urutan 22 dengan nilai 2,82 sehingga perlu dioptimalkan utamanya pada sektor industri pengolahan yang dapat mendorong sektor lainnya seperti pergerakan distribusi barang dan jasa, produksi dan kualitas tenaga kerja

Lanjutan.....

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

09

Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia

pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur sebesar 8,92 tahun mengindikasikan bahwa secara rata-rata, penduduk usia di atas 15 tahun di Kabupaten Luwu Timur belum menyelesaikan pendidikan setara dengan lulus SMP/MTs atau sederajat. Masih perlu dioptimalkan pemerataan akses layanan pendidikan.

10

Belum optimalnya pemenuhan prasarana dan sarana transformasi digital dalam pengembangan literasi digital

Data indeks Pembangunan literasi Masyarakat 59.06 untuk tahun 2022 jauh lebih rendah daripada Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 78,49. disebabkan karena kurangnya akses dan literasi terhadap teknologi belum sepenuhnya menyetuh hingga ke daerah terpencil sehingga menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

11

Belum Optimalnya Cakupan Dan Kualitas Infrastruktur Daerah

data indeks daya saing infrastruktur masih berada diangka 3,21 sehingga perlu ditingkatkan. Akses jalan ke sumber-sumber pertumbuhan ekonomi utamanya pertanian dan pariwisata, jaringan irigasi pertanian, daya dukung sumber air baku bagi masyarakat, kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

12

Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana layanan infrastruktur dasar

ditandai dengan perolehan nilai indek kepuasan layanan infrastruktur 74,89, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, air bersih dan sanitasi, jalan lingkungan, pengolahan persampahan, keterjangkauan akses listrik dan telekomunikasi, dan penguatan tebing/talud sebagai upaya dalam perlindungan dari ancaman bencana.

Lanjutan.....

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

13

Belum optimalnya iklim inventasi daerah

masih rendahnya indeks daya saing daerah dibandingkan dengan kab/kota lainnya di susel, perlu disikapi dengan kepastian hukum dan prosedur birokrasi yang kondusif bagi iklim investasi, kualitas SDM terampil dan ketersediaan infrastruktur yang memadai utamanya yang mendukung kemudahan akses transportasi, energi dan air, seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih dan telekomunikasi.

14

Belum efektifnya tata kelola pemerintahan

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Luwu Timur yang masih berada pada kategori CC dengan nilai 57,68. Angka ini masih jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka provinsi Sulawesi Selatan yaitu 66,16 sehingga perlu lebih dioptimalkan kinerjanya kedepan.

15

Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik

Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik Kabupaten Luwu Timur ditandai dengan perolehan Indeks Pelayanan Publik dengan kategori B- pada tahun 2022 masih perlu ditingkatkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (EKPPP), utamanya peningkatan kinerja pelayanan Dasar (SPM)

16

Belum optimalnya Inovasi Daerah

perolehan Indeks Inovasi Daerah masih pada level inovatif sehingga perlu ditingkatkan mencapai kategori sangat inovatif, jumlah Inovasi yang dihasilkan cukup banyak tetapi belum sepenuhnya dapat mengangkat nilai Indeks Inovasi Daerah dikarenakan pemenuhan Eviden/Indikator belum maksimal

ISU STRATEGIS



Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial

Tantangan:

Penyediaan Lapangan Kerja; Meningkatkan Kualitas SDM; Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan; Membangun Infrastruktur; Mengurangi Kesenjangan Sosial.

Peluang :

Peningkatan Produktivitas; Peningkatan Daya Beli; Peningkatan Pendapatan Per Kapita; Pengembangan Industri; Peningkatan Kualitas SDM.



IKN dan pemerataan pembangunan

IKN dan pemerataan pembangunan merupakan langkah penting untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan merata. Dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, IKN baru dapat menjadi simbol kemajuan bangsa dan pemerataan pembangunan dapat terwujud di seluruh Indonesia,

multiplayer efek dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah perlu disusun strategi kebijakan pembangunan sebagai wilayah penyangga, dengan mengoptimalkan Potensi yang dimiliki, baik pada sektor pertanian, pariwisata, meningkatkan kualitas layanan Infrastruktur daerah

ISU STRATEGIS



Pembangunan berkelanjutan

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030, yaitu:

- (1) Tanpa Kemiskinan;
- (2) Tanpa Kelaparan;
- (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
- (4) Pendidikan Berkualitas;
- (5) Kesetaraan Gender;
- (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- (7) Energi Bersih dan Terjangkau;
- (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
- (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
- (10) Berkurangnya Kesenjangan;
- (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
- (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
- (13) Penanganan Perubahan Iklim;
- (14) Ekosistem Lautan;
- (15) Ekosistem Daratan;
- (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
- (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen fundamental dalam pembangunan daerah. Kualitas SDM yang baik menjadi kunci untuk mendorong kemajuan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam era globalisasi, persaingan antar daerah semakin ketat. Daerah dengan SDM berkualitas tinggi akan lebih mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saingnya.

SDM yang inovatif dan kreatif akan lebih cepat berkembang dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, serta memiliki peluang kerja yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, dan akses yang lebih mudah terhadap berbagai layanan publik.

Lanjutan.....

ISU STRATEGIS



Transformasi teknologi digital

Transformasi digital merupakan proses pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah cara hidup, bekerja, dan berbisnis. Teknologi digital berkembang sangat pesat, seperti, artificial intelligence (AI), dan cloud computing. Adaptasi terhadap teknologi baru ini menjadi kunci untuk tetap kompetitif dan relevan di era digital.

Era digital menghadirkan berbagai tantangan, seperti disrupsi industri, kesenjangan digital, dan juga juga membuka peluang baru, seperti munculnya bisnis baru, peningkatan efisiensi, dan akses informasi yang lebih mudah.



Hilirisasi Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Hilirisasi industri, inovasi, dan infrastruktur merupakan pilar fundamental untuk mencapai pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Sinergi antar pemangku kepentingan dan implementasi kebijakan jangka panjang yang tepat menjadi kunci untuk mewujudkan masa depan daerah yang lebih maju, mandiri dan sejahtera. Tantangan Dinamika Global Kedepan Perlu disikapi secara cermat.

Lanjutan.....

ISU STRATEGIS



Sarana dan Prasarana Layanan Dasar

Penyediaan sarana dan prasarana layanan dasar merupakan elemen penting dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, Transportasi dan energi merupakan kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi oleh pemerintah.



Transformasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik

Transformasi tata kelola dan pelayanan publik merupakan upaya penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dengan melakukan berbagai upaya seperti penguatan kelembagaan, pemanfaatan TIK, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan meningkatkan daya saing daerah.

Lanjutan.....

ISU STRATEGIS



Adaptasi Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Adaptasi ketahanan bencana dan perubahan iklim merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan melakukan upaya adaptasi yang tepat dan berkelanjutan, dapat tercipta daerah yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan

VISI

***“ LUWU TIMUR MAJU,
BERKELANJUTAN DAN HARMONIS
DALAM EKOSISTEM EKONOMI BIRU***

“



PENJELASAN POKOK VISI



MAJU

Terwujudnya manusia unggul, dan masyarakat yang sejahtera, yang memiliki derajat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sehingga memiliki daya saing yang tinggi sebagai modal manusia. Masyarakat Luwu Timur yang sejahtera ditandai oleh tingkat pendapatan yang tinggi dan merata, lapangan kerja dan lapangan usaha yang bisa diakses oleh semua, struktur perekonomian yang didukung oleh produktivitas tinggi serta didukung oleh daya saing daerah yang kuat.



BERKELANJUTAN

kekayaan sumberdaya alam, yang pengelolaannya tetap menjamin keberlanjutan bagi generasi berikutnya serta tangguh dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim. Kondisi ini ditandai dengan adanya kemampuan suatu sistem atau kondisi untuk beradaptasi, bangkit dan berkembang di tengah-tengah tekanan, bencana alam, atau perubahan iklim



HARMONIS

masyarakatnya memiliki kerekatan sosial yang kuat sehingga keragaman agama, suku dan etnis serta heterogenitas sosial yang tinggi termanifestasikan sebagai modal sosial bagi pembangunan daerah. Kondisi ini ditandai oleh kuatnya kesalingpercayaan, resiprositas dan jejaring sosial antar kelompok dan golongan dalam masyarakat sehingga ketertiban dan ketenteraman umum terpelihara dan masyarakat hidup dengan penuh rasa aman



EKONOMI BIRU

Menguatkan sektor unggulan perekonomian daerah yang bersumber dari perairan darat dan laut yang inklusif; pilar sosial berupa ketenagakerjaan berkompetensi maritim, kesehatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau, riset dan pendidikan maritim. pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumberdaya laut secara inklusif untuk mencapai kondisi luwu timur yang maju, berkelanjutan dan harmonis tahun 2045. Ekosistem ekonomi biru ditekankan pada pilar ekonomi berupa perikanan tangkap dan budidaya, manufaktur berbasis maritim, dan pariwisata

MISI

KABUPATEN LUWU TIMUR 2025-2045

Mewujudkan Transformasi Sosial

mewujudkan manusia unggul dan kesejahteraan sosial di Luwu Timur. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan derajat kesehatan secara merata, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendorong perlindungan sosial adaptif.

Meningkatkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam mendukung ekosistem ekonomi biru. Misi ini mencakup upaya umum pembangunan infrastruktur maritim yang berkualitas, penyediaan sarana penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengembangan pariwisata laut berkelanjutan

Mewujudkan Ketahanan Daerah yang Tangguh

mewujudkan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman kejahatan dan keamanan bagi seluruh masyarakat. Misi ini mencakup upaya umum dalam memperkuat ketahanan dalam keamanan dan kenyamanan melalui penegakan hukum, pencegahan kejahatan, pengembangan lingkungan yang ramah bagi semua warga.

Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya

meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, serta menjaga harmonisasi sosial ditengah keberagaman etnis, suku, dan golongan di Luwu Timur. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas keluarga, memajukan kebudayaan, memelihara kerukunan umat beragama, dan memperbaiki kesetaraan gender

Mewujudkan Transformasi Ekonomi

mewujudkan produktivitas perekonomian daerah yang tinggi. Misi ini mencakup upaya umum dalam mentransformasikan perekonomian berbasis sumberdaya alam menuju perekonomian berbasis iptekin melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan perbaikan iklim investasi.

Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

memanifestasikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan kepada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan pemerintah dengan dunia bisnis dan masyarakat sipil. Misi ini mencakup upaya umum dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penguatan sistem inovasi serta sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meningkatkan Daya Saing Daerah

meningkatkan daya saing daerah dalam berbagai aspek sehingga berposisi sejajar atau terkemuka dibanding daerah lain di Indonesia. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan daya saing SDM, daya saing ekonomi, daya saing infrastruktur dan daya saing investasi daerah

Meningkatkan Ketahanan Ekologi

meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai kejadian bencana dan ekologi serta perubahan lingkungan. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara kualitas lingkungan hidup daerah, meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana dan mengurangi emisi gas rumah kaca.



8 M I S I (Agenda) Pembangunan KABUPATEN LUWU TIMUR 2025-2045

TRANSFORMASI

1. TRANSFORMASI SOSIAL
2. TRANSFORMASI EKONOMI
3. TRANSFORMASI TATA KELOLA

LANDASAN TRANSFORMASI

4. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH
5. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA
6. MENINGKATKAN KETAHANAN EKOLOGI

KERANGKA IMPLEMENTAS TRANSFORMASI

7. MEWUJUDKAN KETAHANAN DAERAH YANG TANGGUH
8. MENINGKATKAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

KABUPATEN LUWU TIMUR 2025-2045

01

Terwujudnya Luwu Timur sebagai daerah dengan kualitas manusia yang tinggi

02

Terwujudnya Luwu Timur sebagai daerah dengan Pendapatan Perkapita tertinggi Di Sulsel dan Nasional

03

Terwujudnya Luwu Timur sebagai daerah dengan Daya saing Daerah yang tinggi

04

Terwujudnya Luwu Timur sebagai daerah dengan kinerja Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang terendah di sulawesi selatan

05

Terwujudnya Luwu Timur sebagai daerah dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi

05

Terwujudnya Luwu Timur sebagai daerah yang kondusif,Aman, Demokratis dan stabil

06

Terwujudnya Luwu Timur sebagai daerah dengan kontribusi tertinggi dalam lokomotif pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan berbasis Iptekin, dan Pusat Industri Hilirisasi SDA

07

Terwujudnya Luwu Timur sebagai kawasan Pengembangan agropolitan pendukung IKN berbasis ekonomi hijau, ekonomi biru dan transformasi digital

08

Terwujudnya Luwu Timur sebagai daerah dengan Tingkat Kemandirian Fiskal pada Level kategori Tinggi

09

Terwujudnya Luwu Timur sebagai bagian Wilayah Penyangga Hub Perdagangan Kawasan Timur Indonesia

KESELARASAN INDIKATOR SASARAN VISI KABUPATEN LUWU TIMUR DAN SULAWESI SELATAN 2025-2045

| No | RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 | | | | No | RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045 | | | |
|----|--|---|----------------|-------------|----|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| | Sasaran Visi | Indikator | Base Line 2023 | Target 2045 | | Sasaran Visi | Indikator | Base Line 2023 | Target 2045 |
| 1 | Peningkatan pendapatan/kapita | 1 PDRB per kapita (Rp Juta) | 99,49 | > 100 | 1 | Peningkatan pendapatan / kapita | 1 PDRB per kapita (Rp. Juta) | 78,98 – 79,06 | 422,16 – 497,92 |
| | | 2 Ekonomi Biru (Indeks) | | | | | 2 Indeks Ekonomi Biru | 80,86 | 733,23 |
| | | 3 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | | | | | 3 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan | 12,51 – 12,58 | 18,62 – 19,92 |
| 2 | Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan | 4 Tingkat kemiskinan (%) | 6,93 | 0,15 – 0,25 | 2 | Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan | 4 Tingkat kemiskinan (%) | 5,90 – 6,40 | 0,19 – 0,44 |
| | | 5 Rasio Gini (Indeks) | 0,393 | 0,315-0,298 | | | 5 Rasio Gini (Indeks) | 0,371 – 0,376 | 0,309 – 0,332 |
| | | 6 Kontribusi PDRB kabupaten (%) | 4,69 | > 5.00 | | | 6 Kontribusi PDRB Provinsi | 3,25 | 3,23 |
| 3 | Daya saing sumber daya daerah | 7 Daya Saing Daerah (Indeks) | 2,83 | 4,00 | 3 | Peningkatan daya saing daerah (%) | 7 Indeks Daya Saing Daerah (%) | 3,45 | 4,00 |
| 4 | Peningkatan daya saing sumberdaya manusia | 8 Indeks modal manusia (Indeks) | | | 4 | Peningkatan daya saing sumberdaya manusia (%) | 8 Indeks modal manusia (%) | 0,57 | 0,73 |
| 5 | Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca | 9 Penurunan Intensitas emisi GRK (%) | | | 5 | Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca | 9 Penurunan Intensitas emisi GRK (%) | 37,00 | 89,74 |

TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN LUWU TIMUR 2025-2045

Tahap I
(2025-2029)



**Penguatan Fondasi
Transformasi**

Pertumbuhan ekonomi
diproyeksikan mencapai
> 2 - 5 Persen/tahun

Tahap II
(2030 - 2034)



**Akselerasi
Transformasi**

Pertumbuhan ekonomi
diproyeksikan mencapai
> 3 - 6 Persen/tahun

Tahap III
(2035 - 2039)



**Perluasan Transformasi
dan Ekspansi Global**

Pertumbuhan ekonomi
diproyeksikan mencapai
> 6 - 8 Persen/tahun

Tahap IV
(2040 - 2045)



***Berhasil Mendukung
Indonesia Emas 2045***

Pertumbuhan ekonomi
diproyeksikan mencapai
> 8 - 10 Persen/tahun

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN LUWU TIMUR 2025-2045

Penjabaran 8 Misi Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045

- 1. Kesehatan Untuk Semua**
- 2. Pendidikan Berkualitas dan Merata**
- 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif**
- 4. Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi**
- 5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru**
- 6. Transformasi Digital**
- 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**
- 8. Perkotaan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**
- 9. Regulasi dan Tatakelola yang berintegritas dan adaptif**
- 10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tanggu ,dan demokrasi berkeadilan**
- 11. Stabilitas Ekonomi Makro**
- 12. Penguatan Kerjasama dan Ketahanan Kawasan**
- 13. Beragama maslahat dan berkebudayan maju**
- 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif**
- 15. Lingkungan Hidup Berkualitas**
- 16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan**
- 17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

Terdapat 45 indikator utama pembangunan yang harus dicapai oleh pemerintah provinsi. Pencapaian Sulawesi Selatan dikontribusi oleh pemerintah kab/kota. Pemerintah Kab/Kota wajib merujuk 45 indikator dimaksud dengan beberapa penyesuaian dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dan karakteristik kab/kota untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan

MENJADI RUJUKAN PENYELARASAN INDKATOR PEMBANGUNAN KAB/KOTA

| Arah Pembangunan | Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi | | Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| | (1) | Sulawesi Selatan | (2) | (3) |
| 1. Kesehatan Untuk Semua | 1 | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 1 | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) |
| | 2 | Kesehatan Ibu dan Anak | 2 | Kesehatan Ibu dan Anak |
| | | a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | | a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan |
| | | a) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | | a) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) |
| | 3 | Penanganan Tuberkulosis: | 3 | Penanganan Tuberkulosis: |
| | | a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | | a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) |
| | | a) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | | a) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) |
| | 4 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) | 4 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) |
| | 5 | a) Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk | | |
| | | i) Literasi Membaca | | |
| | ii) Numerasi | | | |
| 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata | | b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk | 5 | a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk |
| | | i) Literasi Membaca | | i) Literasi Membaca |
| | | ii) Numerasi | | ii) Numerasi |
| | | a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | | a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) |
| | | a) Harapan Lama Sekolah | | a) Harapan Lama Sekolah |
| | 6 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | 6 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (diolah dr data Dinas Capil) |
| | 7 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 7 | Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan (sumber BPS) |

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNANlanjutan

| Arah Pembangunan | Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan | | Indikator utama Pembangunan dalam RPJPD Kab/Kota | |
|---|---|--|--|--|
| | (1) | (2) | (3) | (3) |
| 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif | 8 | Tingkat Kemiskinan (%) | 8 | a) Tingkat Kemiskinan (%) a) Indeks Gini |
| | 9 | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) | 9 | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) (menunggu konfirmasi dari Bappenas untuk penjelasan indikator ini, apakah relevan di kab/kota atau perlu proksi) |
| | 10 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | 10 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) |
| | 11 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 11 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) |
| 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Tinggi | 12 | Pengembangan Pariwisata | 12 | Pengembangan Pariwisata |
| | | a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | | a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) |
| | | a) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang) pertumbuhan jumlah wisatawan domestic dan mancanegara | | a) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)/ Persentase |
| | 13 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) | 13 | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) (Berdasarkan data PDRB Menurut Lap Usaha Kab/Kota pada Sektor 13 dan 17 BPS) |
| | 14 | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD | 14 | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD |
| | | a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada level provinsi (%) | | - |
| | | a) Proporsi jumlah industry kecil dan menengah pada level provinsi (%) | | a) Proporsi jumlah industry kecil dan menengah pada level kab/kota (%) |
| | | a) Rasio kewirausahaan Provinsi (%) | | a) Persentase koperasi sehat di kab/kota |
| | | a) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) | | - |
| | | a) Return on Aset (ROA) BUMD (%) | | a) Return on Aset (ROA) BUMD (%) |
| | | a) Nilai Tukar Petani | | a) Produktifitas Pertanian Ket : Produktivitas pertanian dihitung dengan menggunakan rata-rata skor dari tiga komoditas, yaitu tanaman pangan , perkebunan , dan perikanan budidaya |
| | | a) Nilai Tukar Nelayan | | |
| | 15 | Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%) | 15 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%) |
| | 16 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 16 | a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) |
| | 17 | Tingkat Penguasaan IPTEK | 17 | Tingkat Penguasaan IPTEK |
| | | a) Indeks Inovasi Daerah | | a) Indeks Inovasi Daerah |
| | | a) Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD | | a) Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD |

| | | | | |
|--|----------------------------|---|---|--|
| 5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru | 18 | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau | 18 | Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru |
| | | a) Indeks Ekonomi Hijau | | Kontribusi Pilar Lingkungan thd Penerapan Ekonomi Hijau |
| | | a) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | | a) Kualitas air permukaan (BOD), b) Kualitas udara (No2), c) Kualitas Tutupan Lahan Penerapan Ekonomi Biru a) Produktivitas Perikanan Tangkap b) Produktivitas Perikanan Budidaya (silakan disesuaikan dan ditambahkan dgn karakteristik kabupaten utk proksi ekonomi Biru) |
| 6. Transformasi Digital | 19 | a) Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 19 | a) % layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Permendagri 18/2020 Urusan Kominfo) |
| | | a) Indeks Literasi Digital | | |
| 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global | 20 | Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi | 20 | Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia, Bappenas) |
| | 21 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) | 21 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) |
| 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | 22 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 22 | Net Ekspor Barang dan Jasa (BPS, PDRB Kab/Kota Menurut Pengeluaran 2018-2022) |
| | 23 | Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan | 23 | Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan |
| | | a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional | | a) Proporsi kontribusi PDRB kab/kota WM Mamminasata terhadap PDB nas (hanya utk Kota Makassar, Kab Takalar, Gowa, Maros, Pangkep) |
| | | a) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan | | b) Proporsi kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi c) Indeks Layanan Infrastruktur |
| | a) Persentase desa mandiri | | a) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan | |
| | | | Persentase desa mandiri | |

| | | | | |
|--|----|--|----|--|
| 9. Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif | 24 | Indeks Reformasi Hukum | 24 | Perlu dicarikan proksi karena indeks ini tidak tersedia di kab/kota |
| | 25 | Indeks SPBE | 25 | Indeks SPBE |
| | 26 | Indeks Pelayanan Publik | 26 | Indeks Pelayanan Publik |
| | | | | a) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Sumber data : SE Bappenas Nomor 3 Tahun 2023) |
| 10. Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh | 27 | Indeks Integritas Nasional | 27 | a) Indeks Survey Penilaian Integritas |
| | | | | a) Indeks Persepsi Anti Korupsi |
| | | | | a) Indeks Maturitas |
| | 28 | a) Indeks Ketentraman dan Ketertiban Daerah a) Prevalensi penyalahgunaan narkoba | 28 | a) Persentase gangguan tantribum yang dapat diselesaikan a) Persentase perda dan perkara yang ditegakkan |
| 11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | 29 | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya | 29 | Persentase tindak kriminal yang ditangani |
| | 30 | Indeks Demokrasi Provinsi | 30 | Perlu dicarikan proksi karena indikator ini tidak tersedia di kab/kota |
| | 31 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 31 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) |
| | 32 | Tingkat Inflasi (%) | 32 | Tingkat Inflasi Gabungan (%) |
| 12. Ketanguhan Diplomasi Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi | 33 | Pendalaman /Intermediasi Sektor Keuangan a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) a) Aset Dana Pensiun/PDRB (%) a) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata Rata Tahunan a) Total Kredit/PDRB (%) | 33 | Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%) (Permendagri 18/2020) |
| | 34 | Inklusi Keuangan (%) | 34 | Perlu dicarikan proksi karena indikator ini tidak dihitung sampai level kab/kota |
| | 35 | Persentase Kerjasama Daerah yg ditindaklanjuti | 35 | Persentase Kerjasama Kab/kota dengan Kab/Kota lainnya/ Province/City Sister/ Skala Regional/ Nasional/ Internasional yang ditindaklanjuti |
| | 36 | Indeks Ketahanan Nasional | 36 | Indeks Daya Saing Daerah |
| 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju | 37 | a) Indeks Pembangunan Kebudayaan a) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 37 | a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi a) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat |
| | 38 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 38 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (dapat digunakan bagi kab /kota yg memiliki data indikator ini) atau menggunakan indikator proksi : Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi |

| 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif | 39 a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 3 a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 9 |
|--|---|---|
| | a) Indeks Perlindungan Anak | a) Indeks Perlindungan Anak |
| | a) Indeks Pembangunan Pemuda | a) Indeks Pembangunan Pemuda |
| | 40 Indeks Ketimpangan Gender | 40 Indeks Ketimpangan Gender |
| 15. Lingkungan Hidup Berkualitas | 41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | 41 Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati |
| | | a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia |
| | | Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati |
| | | a) Indeks pertanaman (IP) padi |
| | | b) Proporsi sawah irigasi |
| | | c) Produktifitas Budidaya Perikanan tambak |
| | | d) Angka Konsumsi Ikan |
| | 42 Kualitas Lingkungan Hidup | 42 Kualitas Lingkungan Hidup |
| | a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| | a) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | a) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman |
| | a) Pengelolaan Sampah | a) Pengelolaan Sampah |
| | i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) |
| | ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) |
| 16. Berketahanan Energi, Air dan Pangan | 43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan | 43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan |
| | a) Ketahanan Energi | a) Ketahanan Energi |
| | i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) | i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) |
| | ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)* | Tidak relevan di level kab/kota |
| | a) Ketahanan Pangan | a) Ketahanan Pangan |
| | i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) | i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) |
| | ii) Indeks Ketahanan Pangan | ii) Indeks Ketahanan Pangan |
| | iii) Skor Pola Pangan Harapan | iii) Skor Pola Pangan Harapan |
| | a) Ketahanan air | a) Ketahanan air |
| | i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)* | i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)* (dihitung dr data SimSPAM) |
| | ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) |
| 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | 44 Indeks Risiko Bencana | 44 Indeks Risiko Bencana |
| | 45 Persentase Penurunan Emisi GRK (%) | 45 Penurunan Emisi GRK Tahunan (Lihat Aplikasi Aksara) |
| | a. Kumulatif | |
| | b. Tahunan | |



SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia

TERIMA KASIH

Visit Our Website

[www. https://sipd-ri.kemendagri.go.id](https://sipd-ri.kemendagri.go.id)



RPJPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025 - 2045.